

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan pemerintah menyelenggarakan pembaruan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik merupakan dampak dari tuntutan reformasi total. Dampak reformasi pendidikan adalah melahirkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang meliputi demokratisasi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penghapusan diskriminasi, serta perbaikan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat juga menuntut adanya pembaruan sistem pendidikan, agar sesuai dengan tuntutan global. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan strategi dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Tabrani dkk, 2013, h. 246).

Mengingat semua penyelenggaraan pendidikan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka dalam menyelenggarakan pendidikan, dituntut memenuhi mutu minimal yang ada dalam Standar Nasional Pendidikan tersebut. Selain itu, diperlukan pula strategi-strategi dalam pelaksanaannya, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif (Tabrani dkk, 2013, h. 249).

Perubahan paradigma pendidikan di era globalisasi ini mengharuskan adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dan pola tindak (*actionset*) bagi guru terutama dalam mengimplementasikan dan mengembangkan kurikulum (KTSP) yang berlaku sekarang. Perubahan pola pikir dan pola tindak bagi guru dalam mengelola kelas dan melaksanakan proses pembelajaran, menuntut kreatifitas dan kemampuan megembangkan inovasi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan khususnya layanan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses. Dalam Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 menjelaskan,

“Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”.

Pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Sesuai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan perlu diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Hal ini diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1, h. 2).

Pendidikan dapat diperoleh dari usia dini atau kanak-kanak. Di usia ini, karakter manusia dapat dibentuk dan diciptakan sesuai dengan pendidikan yang didapat. Salah satu tujuan adanya pendidikan, yaitu dapat menciptakan keselamatan serta kebahagiaan bagi umat manusia, sesuai dengan pernyataan Ki Hadjar Dewantara yang dikutip oleh Burhanuddin (2013, h. 3) bahwa,

“Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya”.

Lebih lanjut Ki Hadjar Dewantara dalam Haryanto (2010, h. 15) juga menyatakan bahwa beliau juga ingin,

“1) menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan, 2) memandang pendidikan sebagai suatu proses yang dengan demikian bersifat dinamis, dan 3) mengutamakan keseimbangan antar cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak”.

Mutu pendidikan merupakan suatu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pihak sekolah dalam menciptakan anak didik yang berkualitas. Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila di dalam sekolah tersebut terdapat proses pembelajaran yang baik, serta mempunyai lembaga atau badan-badan sekolah yang mampu menangani dan bertanggung jawab atas hasil belajar anak didiknya. Menurut Zahid (2014, h. 669), mutu pendidikan merupakan konsep multidimensi meliputi kelembagaan, pengajaran dan hasil belajar siswa.

Berbagai permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia adalah tentang kesempatan pemerolehan pendidikan anak usia dini masih belum merata dan masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, kurangnya

tenaga pendidik dan kependidikan dari segi jumlah dan mutu, serta masih banyaknya pembelajaran yang berorientasi pada keinginan orang tua bukan pada kebutuhan anak. Berangkat dari kondisi nyata pendidikan anak usia dini tersebut, untuk mengarah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, pemerintah telah mengeluarkan tiga pilar kebijakan pemerintah dalam pendidikan anak usia dini dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014, dan sekarang pemerintah telah menyempurnakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam Kerangka Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019 (Renstra terbaru) (Istiqomah, 2016, h. 57).

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan sejak dini, yang paling utama dari lingkup keluarga dan sekolah sebagai kelanjutannya. Potensi anak akan berkembang sangat pesat yakni antara umur 0 sampai dengan 6 tahun, disitulah pentingnya pendidikan usia dini karena umur tersebut adalah periode usia emas (*golden age*). Pendidikan di sekolah bagi anak usia dini memberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan yang menyangkut fisik motorik halus dan kasar, kecerdasan, sosio emosional bahasa dan komunikasi, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Menurut Apriana, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Apriana, 2009, h. 3).

PAUD merupakan suatu tahap pendidikan yang tidak dapat diabaikan, karena ikut menentukan perkembangan dan keberhasilan anak. Dengan adanya PAUD diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang dengan identitas diri yang kuat (Noorlaila, 2010, h. 8). Pada saat ini di era pembangunan dalam rangka menghasilkan manusia yang memiliki sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas memberikan perhatian yang begitu besar pada PAUD. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal ini dikarenakan PAUD memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan dan menyiapkan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh. PAUD merupakan salah satu jenjang yang paling strategis serta menentukan perjalanan dan masa depan anak secara keseluruhan, serta akan menjadi fondasi bagi penyiapan anak memasuki pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, bahkan akan mewarnai seluruh kehidupannya kelak di masyarakat. Oleh karena itu, PAUD harus memperoleh perhatian yang layak dari berbagai pihak, baik keluarga, pemerintah dan masyarakat (Istiqomah, 2016, h. 58).

Tingginya harapan masyarakat dengan adanya pendidikan usia dini terlihat dari keantusiasan orang tua dalam menyekolahkan putra-putrinya. Hal ini tidak lepas dari guru yang telah melahirkan penerus yang berkualitas. Guru dinilai baik dalam mengajar yaitu ketika guru mampu menguasai kelas dan

terampil dalam menarik minat siswa untuk belajar dengan baik. Menurut Max, mengajar membutuhkan keterampilan improvisasi langsung yaitu dengan mengetahui bagaimana menginterpretasikan situasi yang selalu berubah, perubahan waktu, tanggap dengan apa yang terjadi pada anak, apa yang harus dilakukan, bagaimana menyajikan sesuatu, bagaimana menahan, dan cara membuat nada yang tepat dalam kelas (Manen, 1991, h. 187).

Peningkatan kualitas atau mutu pendidikan PAUD tidaklah mudah. Beberapa PAUD tidak mengalami peningkatan mutu dikarenakan beberapa hal yaitu: 1) Masalah pendidikannya, tidak sedikit lembaga PAUD yang masih asal-asalan berjalan disebabkan karena usia yang relatif baru sehingga pendidikannya kurang berkualitas, belum kreatif dan inovatif; 2) Lembaga PAUD yang masih baru pelaksanaan program masih bersifat asal jalan, asal dapat peserta didik tanpa memperhatikan kualitas pelayanan pendidikan, baik dari segi sarana prasarana, tenaga pendidik/pengasuh, maupun metode pembelajarannya dan 3) Tenaga pendidik yang berkualifikasi dan berkompentensi yang ada sangat terbatas, serta yang berlatar belakang pendidik PAUD, masih heterogen bahkan tak sedikit yang berdasar pengalaman semata (Freyani, 2013).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pendidik yang belum memiliki kualifikasi dan kemampuan sebagai pendidik. Ada beberapa hal yang menjadi acuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas PAUD. Di antaranya acuan itu adalah sebagai berikut: 1) ada standar minimal sebelum masyarakat atau yayasan mendirikan lembaga PAUD, 2) pendidik yang akan terjun langsung di PAUD seharusnya dilatih terlebih dahulu



minimal 2 bulan, sehingga ketika terjun bisa menguasai kelas dengan baik; 3) pendidik PAUD harus tidak berhenti belajar, hendaknya mengikuti pelatihan rutin baik itu sebulan sekali atau dua minggu sekali, 4) pengoptimalan Himpaudi & Forum PAUD, karena anggotanya juga terdiri dari pendidik yang tentunya lebih mengerti pelatihan yang mendesak harus diadakan itu apa; 5) mengadakan studi banding, 6) guru lebih meningkatkan gemar membaca karena ilmu tentang PAUD sangat luas, apalagi mempelajari anak yang unik di butuhkan ilmu yang banyak; 7) guru atau pendidik harus sekolah lagi; 8) pengalokasian dana dari Pemerintah Daerah untuk peningkatan mutu pendidik PAUD di daerah masing-masing; dan 9) ditumbuhkan jiwa meneliti bagi para guru karena begitu kompleknya permasalahan anak, maka setidaknya pendidik harus gemar meneliti jika ada permasalahan yang dirasa mengganjal (Freyani, 2013).

Mulyasa (2011, h. 19) mengatakan bahwa,

“Pemerintah sering melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas guru, antara lain melalui pelatihan, seminar dan loka karya. Bahkan melalui pendidikan formal, dengan menyekolahkan guru pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam praktek pendidikan sehari-hari masih banyak guru yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam menunaikan tugas dan fungsinya. Hal ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri, meskipun sebagian besar tidak menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu dibutuhkan media yang dapat membantu para guru untuk mengidentifikasi permasalahan dan berupaya menemukan pemecahan sendiri melalui kegiatan diskusi dalam kelompok kerja, sekaligus merupakan media pembinaan oleh pemerintah.

Dalam konteks dunia pendidikan, bagaimana cara mewujudkan pendidikan yang bermutu, manusia (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, karyawan, peserta didik, orang tua atau wali siswa, dan

*stakeholder* adalah pelanggan yang harus menjadi pusat perhatian dalam memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Kepuasan peserta didik terletak pada proses yang sedang berlangsung dan hasil pendidikan yang memuaskan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, kualitas pendidikan bukanlah suatu yang berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan terkait sebagai suatu proses dalam sebuah sistem, bila membicarakan masalah kualitas pendidikan maka tidak akan terlepas dari tiga unsur pendidikan yaitu, masukan, proses dan lulusan. Keberadaan lulusan lembaga pendidikan merupakan SDM yang menjadi subjek dan objek pembangunan yang perlu ditingkatkan kualitasnya melalui jalur pendidikan dalam fungsi, proses, dan aktifitasnya yang bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan nasional (Syafaruddin, 2002, h. 2).

Keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggaraan pendidikan memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Perlu dicermati oleh kepala sekolah dalam membuat kebijakan baru adalah menciptakan keadaan baru dari rutinitas yang memungkinkan mendapat penolakan dari personel sekolah. Karena itu, perlu melibatkan personel sekolah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan baru sekolah supaya ada proses pembelajaran dan komitmen dalam keberhasilan kebijakan meningkatkan mutu sekolah (Taufan & Mazhud, 2014, h. 63).



Oleh karena itu, sekolah dituntut dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan terwujud kebijakan kepala sekolah dalam memimpin dan mengatur kegiatan di sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. Pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan penyediaan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja guru dengan mengatur kegiatan kegiatan di sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melihat berbagai faktor faktor yaitu. Menurut Fattah dalam buku Engkoswara dan Aan Komariah (2015, h. 313), ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu: (1) kecukupan sumber sumber pendidikan dalam arti mutu tenaga kependidikan, biaya, sarana belajar, (2) mutu proses belajar yang mendorong siswa belajar efektif, dan (3) mutu pengeluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai.

Di samping itu juga, ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu:

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production foundation* atau input input analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, yaitu terlalu memusatkan pada input proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.
2. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang sentralistik, telah mengakibatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang mempunyai jalur yang panjang

dan kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

3. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan yang minimnya partisipasi mereka terhadap pendidikan (Mulyasa, 2013, h. 24).

Dalam kata lain masalah yang mendasar terkait dengan masalah mutu pendidikan di Indonesia yaitu:

1. Proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang selalu berorientasi pada penguasaan teori dan hapalan pada mata pelajaran sehingga menyebabkan kemampuan belajar dan penalaran anak didik kurang berkembang.
2. Kurikulum di sekolah yang selalu berubah ubah yaitu kurikulum 1994 berupa CBSA, menjadi KBK, lalu ditahun 2006 menjadi KTSP dan K13 (Berbasis karakter).
3. Pelaksanaan pembinaan profesi jabatan guru belum tersistem.
4. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu terpenting dalam pembangunan pendidikan UU No 20 tahun 2003 telah mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD kedinasan, namun kenyataanya hanya beberapa dari yang menggratiskan pendidikan yang hanya untuk sekolah negeri, dan tidak sepenuhnya gratis yang masih ada beberapa pungutan beberapa biaya dari sekolah yang penagaturannya biasanya di lakukan oleh sekolah dan komite sekolah.

5. Otonomi daerah yang menuntut penyelenggaraan pendidikan nasional yang memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sebagai dasar pembangunan nasional dan kerjasama regional (Hasbullah, 2016, h. 49).

Dengan masalah yang mendasar terkait dengan masalah mutu pendidikan di Indonesia, maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan profesional karena kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kunci keberhasilan suatu sekolah pada hakekatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas seorang kepala sekolah. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah dan keberhasilan kepala sekolah adalah keberhasilan sekolah.

Indikator mutu pendidikan menunjukkan peningkatan yang berarti bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor *input* agar menghasilkan *out put* yang setinggi-tingginya. pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan) (Mulyasa, 2004, h. 226).

Dengan demikian bahwa mutu pendidikan terkait dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Di mana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang

terjadi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus bisa menyeimbangi perubahan yang terjadi secara cepat, dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan memerlukan pemetaan dan kebijakan yang profesional yaitu oleh kepala sekolah. Hal itu diperlukan personal yang mampu dan tangguh. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian penyerasian serta pemanduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum sarana dan prasarana) sehingga pembelajaran yang menyenangkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Berdasarkan data studi pendahuluan, peneliti menemukan fakta bahwa mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari berupa: 1) tenaga pendidik yang berpendidikan S-1, 2) memiliki sarana dan prasarana yang cukup mendukung. Sebagai pendidikan formal, RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari mempunyai potensi untuk berkembang sebagai lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Dalam perkembangann mutu pendidikan, RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari patut dibanggakan, karena merupakan salah satu sekolah yang sudah menjalankan sekolah diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

Tercapainya mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari tidak terlepas dari peranan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah tersebut. Penerapan kebijakan kepala sekolah berperan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agar bisa terlaksana secara optimal. Sehingga dengan terlaksananya kegiatan pendidikan yang bermutu diharapkan akan terbentuk citra yang positif dan partisipasi aktif masyarakat di dunia

pendidikan. Jadi berkualitas atau tidaknya suatu mutu di sekolah akan tampak pada peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu, pengawasan yang benar dan objektif menjadi kunci berkualitasnya program dan kegiatan sekolah. Berangkat dari fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah dengan mengambil judul: “**Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu RA (Studi Kasus pada RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari)**”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada kepala sekolah untuk meningkatkan mutu Raudhatul Athfal Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. Secara khusus, kebijakan kepala sekolah yang diterapkan oleh kepala RA dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari dalam hal proses kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan, mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq, implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari?
2. Bagaimana mutu pendidikan RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari?

3. Bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mutu pendidikan RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan kebijakan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini antara lain:

##### **1.5.1 Manfaat Secara Teoretis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan dalam usaha pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.



### 1.5.2 Manfaat Secara Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memperoleh pengalaman profesional yang sangat berharga dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang pernah penulis dapatkan di bangku perkuliahan dengan realita yang ada di lapangan.
2. Bagi Kepala Sekolah, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kepala sekolah untuk melaksanakan dalam rangka peningkatan mutu RA dengan cara yang lebih baik.
3. Bagi Guru, dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga kependidikan yang ada pada dirinya sebagai seorang pendidik yang profesional di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.
4. Bagi Pengurus Yayasan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai wacana pengembangan dan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan dalam satu naungan Yayasan Pendidikan Aisyiyah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini sebagai acuan dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya.
6. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan peningkatan mutu di RA. Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.

## 1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap beberapa istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tercapainya tujuan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan kepala sekolah di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.
2. Peningkatan Mutu adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Peningkatan mutu dalam penelitian ini adalah proses yang dilakukan terus menerus dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.